**PENANGGULANGAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
DI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT**

Nur Handayani

Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
E-mail: nur_handayani@ipdn.ac.id

Mu'min Ma'ruf

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
E-mail: marufmumin@yahoo.com

Gusti Ayu Ambarawati

Institut Pemerintahan Dalam Negeri E-
mail: AYUAMBARAWATI28@GMAIL.COM

ABSTRACT

Prevention of Persons with Social Welfare Problems in Sukabumi City, West Java Province. This study aims to determine the condition of poverty in the city of Sukabumi and to find out what the Sukabumi City government is doing in poverty reduction. With qualitative descriptive methods and data collection techniques of observation, interviews, documentation then analyzed through editing, classification, tabulation and interpretation of data. The results showed that the poverty line in Sukabumi City increased by Rp26,777 in 2015 from Rp395,131 per capita per month to Rp421,908 per capita per month and the percentage of poor people in Sukabumi City in the last five years decreased. Judging from the depth index of poverty (PI) is not deep enough and seen from the poverty severity index (P2) Sukabumi City is not severe enough. This shows that the programs carried out by the Sukabumi City government are quite effective in reducing poverty.

Keywords: *poverty, countermeasures, Sukabumi*

ABSTRAK

Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kemiskinan di kota Sukabumi dan untuk mengetahui apa yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan metode diskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis melalui editing, klasifikasi, tabulasi dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar Rp26.777 di tahun 2015 dari Rp395.131 per kapita per bulan menjadi Rp421.908 per kapita per bulan dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir

kecenderungannya menurun. Dilihat dari indeks kedalaman kemiskinannya (PI) tidak cukup dalam dan dilihat dari indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Sukabumi tidak cukup parah. Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan, penanggulangan, Sukabumi

PENDAHULUAN

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya gelandangan, pengemis, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Berbagai strategi penanggulangan PMKS ditetapkan Pemerintah Kota Sukabumi baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial maupun perlindungan sosial. Namun jumlah PMKS semakin meningkat dan permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan selalu muncul.

Fakta menunjukkan bahwa masih begitu banyak masyarakat di Kota Sukabumi yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat diperlukan peran pemerintah. Melalui www.sapa.or.id diketahui bahwa tahun 2015 penerima PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) sebanyak 14.975 RTS dan penerima dana kompensasi kenaikan BBM sebanyak 181.451 RTS. Penerima kartu sehat sebanyak 26.374 RTS dari warga miskin serta kartu cerdas sebanyak 256 anak dari keluarga miskin.

Penelitian sebelumnya yang dimuat pada Jurnal *Sosio Konsepsia* Vol 4. No 03 Mei-Agustus 2015 menunjukkan bahwa penanganan PMKS yang sifatnya *urgent* dan *emergency* di Kota Sukabumi masih kurang mendapat perhatian sehingga penanganannya tidak sampai tuntas. Hal itu disebabkan tidak adanya sarana prasarana tempat penampungan/*shelter* bagi PMKS yang mendapat bantuan layanan, belum dimilikinya panti maupun rumah singgah yang dapat menampung permasalahan sosial, kurangnya SDM profesional bidang sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi bahwa: masih banyaknya penduduk miskin di Kota Sukabumi; kurangnya sarana pelayanan PMKS; kurangnya SDM profesional di bidang sosial.

Menyadari luas dan kompleksnya permasalahan yang ada, maka penelitian dibatasi pada penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta berhubungan fenomena yang diselidiki sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Dengan metode deskriptif ini, penulis dapat melukiskan dan juga menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di daerah atau lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan hubungan antar-fenomena yang diteliti untuk ditarik simpulan yang bersifat umum. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis melalui editing, klasifikasi, tabulasi dan interpretasi data. Adapun lingkup operasional penelitian ini adalah analisis terhadap kemiskinan di Kota Sukabumi dengan memperhitungkan berbagai aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. secara operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Penanggulangan PMKS

Konsep	Rumusan Masalah	Dimensi
Penanggulangan Pe nya nda ng M a s a l a h Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Sukabumi provinsi Jawa Barat	K o n d i s i Kemiskinan K o t a Sukabumi	Pengeluaran per kapita
		kedalaman kemiskinan (P1)
		I n d e k s keparahan kemiskinan (P2)
		Who
	Penang- gulangan Kemis- kinan	_What
		How

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kemiskinan di Kota Sukabumi

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya perubahan ke arah yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan

jangka panjang sangat ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerahnya guna mewujudkan keadilan sosial. Dengan otonomi daerah dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Sukabumi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2013-2018 menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2013-2018 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013.

Keadilan sosial tidak dapat dikatakan terwujud manakala masih banyak ditemukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Jumlah PMKS di Kota Sukabumi merupakan salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Hal tersebut disebabkan PMKS berkaitan erat dengan kemiskinan. karena yang termasuk PMKS adalah Anak Terlantar, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Balita Terlantar, Anak Jalanan, Lanjut Usia Terlantar, Pengemis, Gelandangan, Korban Narkoba, Tuna Susila, Eks Narapidana, Penyandang Cacat, Anak dengan Kedistabilan, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Anak Korban Tindak Kekerasan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Kelompok Minoritas, Pemulung, Korban Kekerasan, ODHA, *Trafficking* dan = Anak membutuhkan Perlindungan Khusus sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Sukabumi Tahun 2011-2015

Jenis PMKS	Jumlah PMKS (Tahun)				
	2011	2012	2013	2014	2015
A1 = Anak Terlantar	299	290	276	248	318
A2 = Anak Berhadapan Dengan Hukum	58	55	53	48	49
A3 = Balita Terlantar	65	60	57	51	62
A4 = Anak Jalanan	398	370	352	317	53
A5 = Lanjut Usia Terlantar	1.671	1.671	1.587	1.428	1.115
A6 = Pengemis	222	221	210	189	66
A7 = Gelandangan	90	90	86	77	13
A8 = Korban Narkoba	27	78	58	52	26
A9 = Tuna Susila	227	197	197	177	13
A10= Eks Narapidana	96	96	96	87	83
A11=Penyandang Cacat	312	312	312	281	668
A12=Anak dengan Kedistabilisan	75	75	-	-	186
A13=Keluarga Fakir Miskin	8.145	14.255	14.811	13.330	10.850
A14=Kel Bermasalah Sosial Peikologis	-	-	-	-	86
A15=Anak Korban Tindak Kekerasan	1.430	1.430	-	-	84
A16=Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.405	1.401	1.331	1.198	5.773
A17=Korban Bencana Alam	384	274	383	343	3.309
A18 =Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	41
A19 = Kelompok Minoritas	-	-	-	-	95
A20 = Pemulung	34	74	34	31	237
A21 = Korban Kekerasan	-	-	25	23	7
A22 = ODHA	-	-	723	651	12
A23 = Trafficking	-	-	-	-	17
A24 = Anak membutuhkan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	78
Jumlah	14.938	20.949	20.591	18.531	23.241

Sumber: Disosnakertrans Kota Sukabumi

Tabel 2 menunjukkan bahwa Jumlah PMKS Kota Sukabumi tahun 2011 sebanyak 14.948 PMKS dan tahun 2015 sebanyak 23.241 PMKS. Dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan sebesar 8.303 PMKS atau sekitar 35,73 %. Hal ini menunjukkan belum berhasilnya program-program yang berkaitan dengan masalah sosial. Dilihat dari jenis PMKS yang ada, angka yang paling dominan dari

tahun ke tahun adalah masalah sosial fakir miskin, disusul oleh lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam dan penyandang cacat.

Adapun jumlah keluarga fakir miskin sebanyak 10.850 tersebar dalam 6 kecamatan kecuali Kecamatan Warudoyong, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Kota Sukabumi Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Fakir Miskin
Baros	1.587
Citamiang	2.477
Warudoyong	-
Gunung Puyuh	2.040
Cikole	643
Lembursitu	1.915
Cibeureum	2.188
Jumlah	10.850

Sumber: Sukabumi Dalam Angka Tahun Tahun 2016

Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menunjukkan keberhasilan pemerintahan daerah. Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah dengan melihat tingkat kemiskinannya. Gambaran kemiskinan di Kota Sukabumi di sini akan dilihat dari presentase kemiskinan, jumlah masyarakat miskin, indek kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Data hasil SUSENAS tahun 2015 menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kota Sukabumi tahun 2015 sebesar Rp.421908 perkapita perbulan mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar Rp395.131 perkapita perbulan. Ini mengandung arti bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp26.777,-.

Berdasarkan persentasenya di tahun 2014 mencapai 7,65 % kondisi ini masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat yakni sebesar 9,18 % dan nasional sebesar 10,90 % sedangkan pada tahun 2013 mencapai

8,05 %. Kondisi ini pun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa barat yakni sebesar 9,61 % dan Nasional sebesar 11,47 %. Hal ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,40%. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan (GK), yang merupakan batas minimal pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang di Indonesia ditentukan sebesar 2100 kkl perkapita per hari, ditambah dengan kebutuhan non makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi ekoomi atau harga barang-barang kebutuhan pokok yang digambarkan dalam inflasi (17,73%) artinya penduduk tidak miskin namun penghasilannya berada sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser menjadi miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 perkembangan tingkat kemiskinan.

Tabel 4. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Sukabumi (%) Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persen (%)
2010	27.704	9,24
2011	27.300	8,95
2012	26.000	8,41
2013	24.143	8,05
2014	24.200	7,65

Sumber: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2015

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir kecenderungan menurun.

Hal ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup efektif dalam meurunkan angka kemiskinan

Permasalahan kemiskinan juga ditentukan oleh dimensi lain yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Artinya semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Adapun indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sukabumi Tahun 2010-2014

Tahun	Indeks kedalaman Masyarakat Miskin (%)
2010	1,51
2011	1,19
2012	0,97
2013	1,17
2014	0,68

Sumber: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2015

Tabel tersebut menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir kecenderungannya menurun yaitu dari 1,51 % menjadi 0,68 % di tahun 2014 dengan rata-rata penurunan sekitar 0,17 %, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dengan kata lain **tingkat kemiskinan kota Sukabumi tidak cukup dalam.**

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indek keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Perkembangan Indeks Keparahhan (P2)Kota sukabumi Tahun 2010-2014

Tahun	Indeks keparahan Masyarakat Miskin (%)
2010	1,52
2011	0,26
2012	0,18
2013	0,25
2014	0,11

Sumber: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2015

Bila dilihat tabel tersebut meunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Sukabumi dalam kurun waktu lima tahun terakhir kecenderungannya munurun, yaitu dari 1,52 % di tahun 2010 enjadi 0,11 % di tahun 2014, dengan rata-rata penurunan sebesar 0.08 % per tahun.hal tersebut meunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin diantara penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dengan kata lain **tingkat kemiskinan Kota Sukabumi tidak cukup parah.**

Penanggulangan Kemiskinan yang Dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertransi) Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Untuk mendiskripsikan apa yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan penulis menggunakan teori Markides (2004) dalam Tjiptono yang berkaitan dengan strategi pengambilan keputusan. Markides menegaskan bahwa strategi merupakan pengambilan keputusan yang merupakan tiga parameter utama yaitu dimensi who, dimensi what dan dimensi how.

Merujuk pada Peraturan Walikota Sukabumi Tahun 23 Tahun 2012 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2015 ada lima strategi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan yaitu:

1. Perlindungan sosial;
 2. Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha;
 4. Kemitraan;
 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
- Untuk melaksanakan strategi diperlukan kebijakan . Adapun kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan Kota Sukabumi adalah:

1. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Makro;
2. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha;
3. Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Dasar;
4. Kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Kebijakan Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan

Dari kebijakan yang dikeluarkan kemudin disusun program-program penanggulangan kemiskianan diantaranya adalah:

1. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Sasaran, baik program nasional maupun program daerah yang terdiri dari tiga klaster. Klaster pertama berbasis keluarga, klaster kedua berbasis pemberdayaan dan klaster ketiga berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Reguler Pada Sektor-Sektor, yang pelaksana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinannya adalah Lembaga/ SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Sesuai Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Sukabumi ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap bidang urusan sosial adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) dengan sasaran menurunnya laju pertumbuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
4. Program Pembinaan Panti asuhan/ panti jompo

Penanganan PMKS di Kota Sukabumi terus dilakukan melalui bimbingan sosial dan mental, pelatihan dan keterampilan, bantuan pelayanan kemiskinan, bantuan

langsung untuk masyarakat miskin dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan atau keahlian PMKS serta untuk meningkatkan taraf hidup yang layak. Adapun PMKS yang ditangani tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 PMKS yang Ditangani Tahun 2016

No.	Jenis PMKS	Jumlah (Orang)	%
1.	Lansia	60	0,15
2.	WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)	30	0,075
3.	WPS	30	0,075
4.	Gepeng (Gelandangan Pengemis)	155	0,39
5.	Anjal (Anak Jalanan)	130	0,33
6.	Disabilitas	40	0,10
7.	Orang Terlantar	136	0,31
8.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	300	0,75
9.	Korban Bencana	569	1,43
10.	Pelayanan Kemiskinan melalui Pandu Gempita	9.005	22,60
11.	Bantuan Langsung untuk keluarga sangat miskin melalui program (PKH)	29.382	73,75
Jumlah		39.837	99,67

Sumber: *Disosnakertrans Tahun 2016*

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi adalah penanganan keluarga sangat miskin sebesar 73,75 % disusul pelayanan kemiskinan melalui UPT Pandu Gempita yang sekarang bernama SLRT REPEH RAPIH sebesar 22,60 %. UPT ini bertugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan

kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi. Jenis rekomendasi bidang sosial meliputi:

- (1) Rekomendasi pemasangan listrik/ tambah daya 900 Watt
- (2) Rekomendasi SKM pembebasan biaya perkara
- (3) Rekomendasi SKM untuk melamar pekerjaan.
- (4) Rekomendasi mengikuti reabilitasi/ pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas
- (5) Rekomendasi untuk sewa rumah

Program-program yang ditetapkan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) meliputi:

- 1). Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis kelompok sasaran dan
- 2) Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, selengkapnya diuraikan di bawah ini:

• ***Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis kelompok sasaran.***

Program penanggulangan kemiskinan berbasis kelompok sasaran ini mencakup program nasional maupun program Pemerintah Kota Sukabumi. Penanggulangan kemiskinan berbasis kelompok sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) klaster sbb:

Klaster I Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

1. **Dimensi Who** (siapa yang menjadi target pelanggan). Dari dimensi ini yang menjadi target pelanggan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial berbasis keluarga

adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Sangat Miskin yang berjumlah 5.438 RTS dengan jumlah bantuan sebesar Rp2.706.273.750

2. **Dimensi *What*** (produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan) dalam hal ini RTS Sangat Miskin adalah program Keluarga Harapan (PKH).
3. **Dimensi *How*** (aktivitas apa yang akan dan tidak akan dilakukan). Pada dimensi ini aktivitas yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan langsung masyarakat yang disingkat dengan BLM.

Kluster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (kluster II) terdiri dari program nasional dan program daerah.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya. Namun demikian KAT tidak ada di Kota Sukabumi hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi pada saat diwawancarai pada Selasa, 29 Agustus “bahwa di Kota Sukabumi ini tidak ada Komunitas Adat Terpencil” maka pemberdayaan disesuaikan dengan kelompok sasaran

1. **Dimensi *Who*** (siapa yang menjadi target pelanggan). Dari dimensi ini yang menjadi target pelanggan adalah: masyarakat miskin yang tergolong dalam:
 - a. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang berjumlah 90 orang
 - b. Lanjut Usia (Lansia) berjumlah 60 orang
2. **Dimensi *What*** (produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan) berupa Bantuan Langsung OPD (BL

OPD) kepada 90 orang WRSE dengan jumlah bantuan yang telah diberikan sebanyak Rp116.438.00 dan kepada Lansia berjumlah 60 orang dengan jumlah bantuan yang telah diberikan sebanyak Rp316.161.717

3. **Dimensi *How*** (aktivitas apa yang akan dan tidak akan dilakukan). Pada dimensi ini aktivitas yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan langsung masyarakat yang disingkat dengan BLM.

Kluster III Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. **Dimensi *Who*** (siapa yang menjadi target pelanggan). Pada dimensi ini yang menjadi target pelanggan adalah masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas.
2. **Dimensi *What*** (produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan). Pada dimensi ini jasa yang ditawarkan adalah rekomendasi bagi keluarga miskin untuk mendapatkan layanan gratis pemasangan listrik/tambah daya < 900 watt, pembebasan biaya perkara, melamar pekerjaan, mengikuti rehabilitasi/pelatihan keterampilan, sewa rumah, alat bantu pendengaran, pernikahan dan program Bantuan Langsung Non Tunai (BLNT).
3. **Dimensi *How*** (aktivitas apa yang akan dan tidak akan dilakukan). Aktivitas yang dilakukan dalam dimensi ini adalah memberikan layanan pengaduan masyarakat, atas dasar pengaduan tersebut jika pengadu telah membawa persyaratan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian dengan data yang tersedia kemudian

melaksanakan registrasi, verifikasi dan validasi data, kemudian baru dikeluarkan rekomendasi. Secara rinci program, anggaran dan prosedur dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Program, Anggaran dan Prosedur Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis	Dimensi			Anggaran (Rp)	Prosedur
	Who	What	How		
1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	R T S Sangat Miskin	PKH (Program Keluarga Harapan)	• Transfer BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada 5.438 org	APBN 2.706.273.750	Transfer BLM
2. Pemberdayaan	WRSE dan Lansia	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & PMKS lainnya	melalui: 1. pelatihan keterampilan bagi 90 WRSE dan 60 Lansia di BLK Kel. Lembur Situ Kec.Lembur Situ	APBD 150.000.000	Transfer BL OPD
			2. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin sebanyak 10 KUBE di Dinsosnakertran	40.500.000	
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos	PMKS	Pelaksanaan Konseling dan Kampanye Sosial	• Melakukan bimbingan konseling dan kampanye sosial terhadap 90 WTS, 90 gepeng, 30 korban kekerasan seksual di Dinsosnakertran	APBD 232.500.000	Transfer BL OPD
	PMKS	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Membuat angklung dan gitar kepada 150 anjal dan 50 penyandang disabilitas	70.900.000	Transfer BL OPD
	PMKS	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Sosialisasi PKH dan Pandu Gempita di BLK Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu	215.700.000	APBD

PMKS	Penanganan masalah-masalah strategis menyangkut kejadian cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa	Penanganan terhadap korban bencana sebanyak 75 KK dan 250 orang terlantar	122.800.000	APBD
------	--	---	-------------	------

Sumber: LP2KD Kota Sukabumi 2016

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami kenaikan sebesar Rp26.777 di tahun 2015 dari Rp395.131 perkapita perbulan menjadi Rp.421908 per kapita per bulan dan persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir kecenderungannya menurun. Dilihat dari indeks kedalaman kemiskinannya (PI) tidak cukup dalam dan dilihat dari indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Sukabumi tidak cukup parah. Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi cukup efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Adapun program yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi dalam penganggulangan kemiskinan adalah:

1. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Sasaran
2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Reguler Pada Sektor-Sektor.

SARAN

Agar target kemiskinan yang ditanggulangi semakin besar kuantitasnya maka seyogyanya Pemerintah Kota Sukabumi menambah:

1. Anggaran dalam penanganan kemiskinan di tahun 2018 .
2. Berbagai diklat bagi masyarakat miskin dengan kerja sama swasta dan pihak ketiga
3. Melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin sampai pada tingkat kemandirian,

DAFTAR PUSTAKA

- Tjiptono, Fandy. (Ed-4). 2015. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Suharisman, Muslim, 2015, *Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi*. Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Jakarta Timur
- Jurnal *Sosio Konsepsia* Vol 4. No 03 Mei-Agustus 2015.
- Peraturan Walikota Sukabumi No. 23 Tahun 2012 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013-2015
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Sukabumi Tahun 2016
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2015

www.sapa.or.id